

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia yang menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dapat memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban untuk perintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi

logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Pelimpahan tanggung jawab diikuti dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah juga diharapkan agar lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sehingga bisa membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja langsungnya (Soesantro, 2005:15).

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, terletak pada kemampuan keuangan daerah, dimana daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelolala dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Tangkilisan, 2005:82). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin

rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pembangunan di daerah akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai akan membuat masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat akan membuat pendapatan masyarakat bertambah dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang harusnya dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi sumber keuangan terbesar daerah nyatanya masih sering terjadi permasalahan. Pemerintah daerah yang belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya merupakan permasalahan yang sering membuat Pendapatan Asli Daerah tidak meningkat. Masalah sederhana juga yang membuat tidak meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah ketidaksadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan ke Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dana yang diterima dari pemerintah pusat, Pemda juga mempunyai

sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain.

Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama dari pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Tujuan transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Dana Alokasi Umum bertujuan menjaga keseimbangan atau pemerataan antar daerah yang dibagi berdasarkan kebutuhan daerah yang tercermin dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat. Dana Alokasi Umum digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah. Masalah yang sering terjadi adalah Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai.

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diperuntukkan hanya untuk kegiatan fisik. Masalah yang sering terjadi adalah bidang alokasi DAK seringkali tidak konsisten dengan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah Se Daratan Flores
Tahun 2016-2020

| NO | Kabupaten | PAD (dalam rupiah) | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Flores Timur | 50.183.797.325.36 | 35.798.449.379.20 | 52.395.525.553.40 | 60.245.857.471.89 | 51.265.497.469.36 |
| 2 | Sikka | 80.269.749.570.99 | 71.250.272.488.17 | 96.754.387.467.59 | 79.239.104.306.28 | 89.635.519.712.18 |
| 3 | Ende | 68.865.679.022.82 | 116.855.595.816.00 | 27.426.037.544.27 | 60.994.745.886.81 | 64.885.133.744.65 |
| 4 | Ngada | 47.502.339.405.00 | 65.253.752.165.00 | 6.494.395.244.06 | 40.706.414.869.85 | 33.662.627.041.91 |
| 5 | Nagekeo | 29.671.653.790.77 | 46.160.609.301.00 | 29.642.175.642.29 | 28.327.840.099.02 | 31.282.088.315.46 |
| 6 | Manggarai Timur | 44.112.085.695.00 | 26.247.555.618.59 | 32.814.717.337.37 | 40.152.816.777.37 | 44.577.381.653.57 |
| 7 | Manggarai | 78.284.065.871.33 | 84.334.945.444.07 | 89.902.549.522.78 | 103.561.377.954.77 | 81.325.840.359.01 |
| 8 | Manggarai Barat | 91.068.685.754.22 | 88.003.957.660.47 | 92.337.554.887.64 | 169.920.911.284.19 | 87.450.970.737.97 |

Sumber: Bagian Akuntansi provinsi NTT

Tabel 1.2
Rincian Dana Alokasi Umum Kabupaten Se Daratan Flores
Tahun 2016-2020

| NO | Kabupaten | DAU (dalam rupiah) | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Flores Timur | 608.075.549.000.00 | 601.305.722.000.00 | 608.246.576.000.00 | 637.205.935.000.00 | 495.665.645.000.00 |
| 2 | Sikka | 626.916.589.000.00 | 617.286.551.000.00 | 622.679.290.000.00 | 647.862.407.000.00 | 586.220.258.000.00 |
| 3 | Ende | 621.695.004.000.00 | 616.547.687.000.00 | 621.873.578.000.00 | 654.994.752.000.00 | 592.619.007.000.00 |
| 4 | Ngada | 473.589.249.000.00 | 478.220.326.203.00 | 193.062.032.197.00 | 485.963.235.200.00 | 445.805.432.000.00 |
| 5 | Nagekeo | 433.196.524.000.00 | 429.644.584.000.00 | 432.406.320.000.00 | 454.351.825.000.00 | 412.477.821.000.00 |
| 6 | Manggarai Timur | 512.279.378.847.00 | 499.269.564.000.00 | 507.763.475.000.00 | 533.974.640.000.00 | 488.307.791.000.00 |
| 7 | Manggarai | 575.280.999.000.00 | 569.792.719.000.00 | 572.870.496.000.00 | 606.097.107.000.00 | 553.097.333.000.00 |
| 8 | Manggarai Barat | 499.046.254.000.00 | 496.316.854.000.00 | 506.495.526.000.00 | 532.878.109.000.00 | 498.893.859.000.00 |

Sumber: Bagian Akuntansi provinsi NTT

Tabel 1.3
Rincian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Se Daratan Flores
Tahun 2016-2020

| NO | Kabupaten | DAK (dalam rupiah) | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Flores Timur | 230.863.523.469.00 | 128.736.713.500.00 | 216.818.990.907.00 | 180.901.963.583.00 | 135.331.009.952.00 |
| 2 | Sikka | 227.483.727.453.00 | 151.516.724.003.00 | 182.748.667.364.00 | 241.485.916.714.00 | 167.512.233.397.00 |
| 3 | Ende | 248.333.684.409.00 | 151.156.670.776.00 | 182.115.289.753.00 | 271.923.106.395.00 | 212.772.057.231.00 |
| 4 | Ngada | 133.393.851.690.00 | 163.229.587.083.00 | 21.065.970.641.00 | 141.795.414.975.00 | 75.676.937.796.00 |
| 5 | Nagekeo | 167.174.010.000.00 | 94.634.883.142.00 | 119.884.445.535.00 | 178.077.569.952.00 | 151.055.508.740.00 |
| 6 | Manggarai Timur | 179.457.973.962.00 | 175.913.269.941.00 | 248.587.452.378.00 | 244.514.647.132.00 | 214.100.226.753.00 |
| 7 | Manggarai | 228.920.405.337.00 | 229.529.838.280.00 | 224.296.816.486.00 | 265.966.354.417.00 | 227.636.532.967.00 |
| 8 | Manggarai Barat | 161.859.810.006.00 | 186.329.313.984.00 | 251.523.066.541.00 | 216.891.072.985.00 | 215.666.938.326.00 |

Sumber: Bagian Akuntansi provinsi NTT

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Se Daratan Flores dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. sementara itu pendapatan yang Diperoleh dari Dana Alokasi Umum cenderung meningkat. Sama halnya dengan PAD, Dana Alokasi Khusus juga mengalami fluktuasi. Permasalahan yang terjadi adalah jumlah pendapatan yang diterima dari PAD cenderung lebih kecil dari pada jumlah pendapatan yang diterima dari DAU dan DAK.

Tabel 1.4
Rincian Belanja Langsung Kabupaten Se Daratan Flores
Tahun 2016-2020

| NO | Kabupaten | BELANJA LANGSUNG (dalam rupiah) | | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Flores Timur | 394.939.641.287.00 | 379.350.536.168.00 | 431.739.983.504.00 | 431.830.746.480.40 | 333.681.676.863.00 |
| 2 | Sikka | 416.464.894.785.00 | 372.183.034.852.46 | 386.149.460.150.82 | 444.319.319.867.74 | 342.747.571.163.77 |
| 3 | Ende | 417.667.983.869.00 | 387.057.281.830.00 | 293.559.804.918.00 | 444.572.456.677.50 | 363.219.171.377.46 |
| 4 | Ngada | 384.860.123.751.07 | 394.043.372.778.12 | 27.108.132.915.00 | 326.743.705.699.17 | 224.741.999.049.64 |
| 5 | Nagekeo | 417.066.125.482.80 | 345.556.945.201.94 | 318.570.975.927.06 | 368.711.465.688.25 | 285.913.574.202.04 |
| 6 | Manggarai Timur | 396.174.945.689.00 | 378.984.432.447.00 | 409.035.620.888.03 | 449.663.226.518.71 | 397.734.649.604.00 |
| 7 | Manggarai | 561.569.640.955.00 | 464.544.002.677.00 | 534.445.808.043.00 | 521.019.516.220.00 | 401.452.880.328.00 |
| 8 | Manggarai Barat | 438.291.311.440.60 | 506.740.151.080.14 | 491.879.828.595.60 | 562.610.151.321.00 | 456.224.680.841.35 |

Sumber: Bagian Akuntansi provinsi NTT

Belanja Daerah terdiri dari dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan belanja langsung yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten Se Daratan Flores jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Ini menunjukan bahwa pemerintah daerah lebih mengharapkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai semua kegiatan belanja langsung dari pada mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk memperoleh PAD yang maksimal. Pemerintah daerah seharusnya tidak bergantung dengan dana perimbangan dalam membentuk kemandirian

daerahnya, jika dana perimbangan tidak ada maka perputaran roda keuangan akan sangat buruk. Hampir di semua daerah, APBD didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi terbatas (Yani, 2002:3).

Kabupaten yang berada di daratan Flores yang menjadi obyek dalam penelitian ini sering terjadi permasalahan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung daerahnya. Pemerintah Daerah masih belum optimal dalam menggali potensi daerah yang dimilikinya untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Se Daratan Flores juga masih sangat bergantung kepada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam membiayai Belanja Langsung dan belanja pembangunannya. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya habis digunakan untuk belanja pegawai. Cara agar Pendapatan Asli Daerah terus Meningkat yaitu dengan mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ari Rahmat (2016) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Langsung, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap

Alokasi Belanja Langsung. Adapun hasil penelitian yang dibuat oleh Nurul Hidayah dan Hari Setiyati yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Langsung

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yulianus Lisa, Priyagus (2017) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja langsung, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Selain itu Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Andika Nofiyanto (2020) dan Tituk Diah Widajantie (2021) hasil penelitiannya menunjukkan ada kesamaan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh atau tidaknya PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Langsung, sehingga penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Se Daratan Flores Tahun 2016-2020”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dalam penelitian dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten se-daratan Flores?

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten se-daratan Flores?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten se-daratan Flores?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten se-daratan Flores?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten se-daratan Flores
2. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten se-daratan Flores.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten se-daratan Flores.
4. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten sedaratan Flores.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Se-daratan Flores mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai Wahana untuk memahami teori Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Se-daratan Flores. Sebagai referensi bagi penelitian yang ingin mengkaji variabel yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda pada waktu yang akan datang.